



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Mei 2017

Halaman: 1

Pemkot Bersiap Terapkan Transaksi Non Tunai

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta akan menerapkan transaksi non tunai mulai semester 2 tahun 2017. Pada tahap awal transaksi non tunai itu untuk belanja atau pengeluaran pemkot dengan nilai lebih dari Rp 5 juta. Sesuai surat edaran dari Mendagri, pemda melaksanakan transaksi non tunai paling lambat 1 Januari 2018.

Penjabat Walikota Yogyakarta Sulistiyo menilai kemajuan zaman dan penggunaan teknologi di masyarakat membuat dalam mengerjakan pekerjaan dituntut secara cepat, tepat dan tanpa harus bertatap muka. Termasuk dalam transaksi keuangan. Oleh sebab itu pemerintah juga harus mengikuti sistem transaksi non tunai untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Transaksi non tunai ini menjawab harapan masyarakat. Transaksi non tunai berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Realisasinya, pada semester dua tahun 2017 direncanakan pengeluaran daerah di atas Rp 5 juta harus dilakukan secara non tunai," kata Sulistiyo saat membuka sosialisasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, di Balaikota, Selasa (16/5).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono menambahkan, untuk menerapkan transaksi non tunai itu perlu penyiapan dan koordinasi dengan perbankan milik pemerintah seperti Bank BPD DIY dan Bank Jogja. Pada tahap awal menurutnya penerapan transaksi non tunai yang paling mudah pada pengeluaran untuk membayar honorarium pegawai.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005